

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual terkait fokus dan sub fokus penelitian ini diantaranya sebagai berikut;

2.1.1. Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah suatu kerangka yang menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam dampak tindakan organisasi, bukan hanya memusatkan perhatian pada pemegang saham (R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Bidhan L. Parmar, 2010:140-150). Teori pemangku kepentingan berperan sebagai panduan utama yang tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar teori ini, tetapi juga mendorong penerapan dalam berbagai situasi. Teori ini menekankan pentingnya aspek etis dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam menjalankan praktik bisnis (Freeman et al., 2019:3-250).

Dasar teori pemangku kepentingan diperkenalkan oleh R. Edward Freeman dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, teori ini telah

berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang seperti manajemen, keuangan, dan kebijakan publik (R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Bidhan L. Parmar, 2010:1-200). Definisi pemangku kepentingan yang terbatas hanya mencakup pihak-pihak yang dianggap penting untuk mencapai tujuan perusahaan, sementara definisi yang lebih luas mencakup semua entitas yang dipengaruhi oleh Tindakan perusahaan. Pandangan yang lebih luas ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori pemangku kepentingan (Andrew L. Friedman et al., 2006). Menurut buku *Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends* oleh Thomas L. McPhail dan Steven Phipps (2020), Teori Pemangku Kepentingan menekankan pentingnya memahami dan merespons kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas organisasi, seperti konsumen, karyawan, pemerintah, LSM, dan media, dalam konteks komunikasi dan dinamika organisasi yang lebih luas (Thomas L. McPhail, 2020:1-328)

2.1.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menekankan hubungan antara legalitas dan legitimasi, di mana hukum harus mencerminkan nilai budaya masyarakat agar diterima dan ditaati (Cliteur & Ellian, 2019:1-223). Dalam konteks ini, seperti dijelaskan dalam buku *A Theory of Global*

Governance: Authority, Legitimacy, and Contestation (Michael Zürn, 2018:1-331), legitimitas bukan hanya landasan utama bagi pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga merupakan elemen kunci yang memungkinkan keberlanjutan suatu system pemerintahan atau organisasi di tengah dinamika global. Legitimasi dianggap sebagai proses dinamis yang melibatkan pengakuan, penerimaan, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, memahami bagaimana legitimitas dibangun, dipertahankan, atau bahkan dipulihkan menjadi sangat penting, terutama di era modern yang ditandai oleh meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam tata kelola (Zürn, 2018:1-331). Teori legitimitas menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk mengelola konflik hukum antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam konteks keberlanjutan (Marsden, 2011:1-310). Dengan demikian, keberlanjutan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, keadilan, akuntabilitas, dan peran ekonomi global untuk menghadapi tantangan secara efektif (Clark et al., 2013:1-237).

2.1.3. Carbon Emission Disclosure

Pengungkapan emisi karbon merupakan hal yang sangat signifikan bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan serta dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas operasional

perusahaan. (Sholihah et al., 2023). Pengungkapan emisi karbon memungkinkan para investor untuk menilai upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim. (Kurnia et al., 2021). Selain itu, pengungkapan ini juga sangat krusial bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan potensi resiko lingkungan yang mungkingtimbul dari aktivitas perusahaan. (Sholihah et al., 2023).

Pengungkapan emisi karbon dapat diukur menggunakan *carbon emission disclosure checklist* yang dikembangkan oleh (Choi et al., 2013), yang diadaptasi dari formular permintaan informasi *Carbon Disclosure Project* (CDP). (Manurung et al., 2022). Metode pengukuran ini memberikan sekor 1 untuk item yang diungkapkan, dengan skor maksinal 18 dan minimal 0 (Choi et al., 2013; Damas et al., 2021). Informasi terkait pengungkapan emisi karbon umumnya dapat ditemukan dalam *sustainability report* dan *annual report*. (Damas et al., 2021).

Tabel 2. 1
Item *Carbon Emissions Disclosure*

No	Kategori	Item	Keterangan
1	Perubahan Iklim: Resiko dan Peluang (<i>Climate Change:</i> Risk and Opportunity	CC1	Mengidentifikasi resiko iklim yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan.
		CC2	Evaluasi dampak keuangan dari perubahan iklim terhadap perusahaan, baik dalam jangka Panjang maupun jangka pendek.
2	Emisi Gas Rumah Kaca/ <i>Greenhouse Gas</i> (GHG0	GHG1	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK (misalnya menggunakan <i>GHG Protocol</i> atau ISO 14064)
		GHG2	Menyatakan apakah perusahaan melakukan verifikasi eksternal terhadap data emisi GRK yang dilaporkan (Kuantitas Emisi GRK)
		GHG3	Total emisi GRK yang dihasilkan perusahaan, diukur dalam Ton CO ₂ -ekivalen
		GHG4	Melaporkan emisi GRK berdasarkan kategori <i>Scope</i> yang ditentukan (<i>Scope</i> 1: Langsung dari konsumsi energi, <i>Scope</i> 2:

			Tidak langsung dari konsumsi energi, <i>Scope 2</i> : Dari aktivitas lain).
		GHG5	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan jenis sumber energi yang digunakan oleh perusahaan (misalnya batu bara, Listrik, dan lainnya).
		GHG6	Pengungkapan data emisi GGRK berdasarkan fasilitas atau segmen tertentu dalam perusahaan.
		GHG7	Menyediakan data perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
3	Konsumsi Energi (<i>EC/Energy Consumption</i>)	EC1	Menyebutkan total konsumsi energi yang digunakan oleh perusahaan dalam satuan <i>Tera-Joule/Peta-Joule</i>)
		EC2	Melaporkan kuantifikasi energi yang digunakan berasal dari sumber terbarukan.
		EC3	Menyediakan rincian penggunaan energi berdasarkan jenis energi atau fasilitas yang ada.
4	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Biaya (<i>RC/Reduction</i>)	RC1	Menjelaskan rencana atau strategi perusahaan untuk mengurangi emisi GRK
		RC2	Menyatakan target penurunan emisi GRK

	<i>and Cost)</i>		yang ingin dicapai beserta jangka waktunya.
		RC3	Melaporkan pengurangan emisi yang sudah tercapai dan penghematan biaya terkait pengurangan emisi.
		RC4	Menyatakan proyeksi biaya yang terkait dengan emisi di masa depan, termasuk dalam perencanaan belanja modal perusahaan.
5	Akuntabilitas Emisi Karbon) ACC/ <i>Carbon Emission Accountability)</i>	ACC1	Menyebutkan komite atau badan eksekutif yang bertanggung jawab atas tindakan terkait perubahan iklim.
		ACC2	Menjelaskan mekanisme yang digunakan oleh dewan untuk memantau dan menilai kemajuan tindakan terkait perubahan iklim.

Sumber : (Choi et al., 2013; Damas et al., 2021)

Checklist 18 item akan dihitung menggunakan rumus :

Keterangan:

CED : *Carbon Emission Disclosure*

Item pengungkapan emisi karbon yang diteliti disusun dibawah kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan perusahaan, terutama fokus pada dampak lingkungan bisnis dalam kaitannya dengan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan akuntabilitas.

a. Resiko dan Peluang Perubahan Iklim

Resiko dan peluang dalam perubahan iklim berkaitan dengan identifikasi resiko terkait iklim dan peluang bisnis, termasuk bagaimana perusahaan mengatasi tantangan saat ini dan masa depan yang disebabkan oleh perubahan iklim. (TCFD, 2017).

b. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Gas rumah kaca dihitung berdasarkan pedoman dari (Yusuf, 2021), yang banyak digunakan untuk menghitung dan melaporkan emisi, serta (ISO, 2018a) untuk verifikasi.

c. Konsumsi Energi

Konsumsi energi berfokus pada total energi yang digunakan oleh perusahaan, termasuk bagian dari sumber terbarukan. (ISO, 2018b).

d. Pengurangan dan Biaya

Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menyoroti terkait biaya yang terlibat pada pelaporan strategi pengurangan

emisi, dan hasil yang dicapai dalam target pengurangan emisi (GRI 302, 2016; TCFD, 2017).

e. Akuntabilitas Emisi Karbon

Mendeskrripsikan mekanisme akuntabilitas, termasuk pengawasan dewan dan peninjauan Tindakan terkait iklim, dan memastikan bahwa manajemen puncak secara aktif terlibat dalam strategi terkait iklim (TCFD, 2017).

2.1.4. *Green Investment*

Green Investment merupakan jenis investasi yang diarahkan pada proyek dan inisiatif yang mendukung kelestarian lingkungan dan transisi ke ekonomi rendah karbon (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). Investasi berkelanjutan difokuskan pada energi terbarukan, efisiensi energi, infrastruktur hijau, dan konservasi lingkungan. BKPM menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, *Green investment* tumbuh pesat seiring meningkatnya kesadaran investor terhadap isu perubahan iklim dan dampak lingkungan dari keputusan investasi mereka (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). Regulasi seperti UU No. 25 Tahun 2007 dan Perpres No. 16 Tahun 2012 mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia. Kedua aturan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan nasional dan global, yang dituangkan dalam *Sustainable Investment Guide* (JDIH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007; Presiden Republik Indonesia, 2012).

Dalam pedoman yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi. investasi keberlanjutan adalah investasi berbasis ESG yang mempertimbangkan keuntungan finansial serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan investasi (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). *Green Investment* termasuk dalam spektrum investasi yang menggabungkan pengembalian finansial dan sosial, dengan fokus pada keberlanjutan. Investasi ini menilai risiko dan peluang lingkungan, terutama untuk hasil jangka menengah hingga panjang (Patalano, 2020). *Green Investment* adalah penggalangan modal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui produk, layanan, atau aktivitas yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menerapkan strategi investasi berbasis dampak atau prinsip ESG (Global Investor for Sustainable Development Alliance dalam panduan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022).

Berbeda dengan investasi konvensional, investasi berkelanjutan (*green investment*) bertujuan memberikan dampak nyata pada isu sosial dan lingkungan. Jenis investasi ini mencakup sektor seperti energi terbarukan, inklusi keuangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanian, dan perumahan (Hill, 2020). Meningkatnya perhatian

terhadap *green investment* mendorong pemerintah dan lembaga terkait memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja lingkungan mereka.

2.1.4.1. PROPER

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup memutuskan memutuskan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, konservasi sumber daya, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penilaian diklasifikasikan dalam lima kategori warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam, yang mencerminkan tingkat kinerja masing-masing perusahaan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong

perusahaan mematuhi standar lingkungan, meningkatkan pengelolaan lingkungan, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional perusahaan di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Berikut merupakan uraian terkait peringkat PROPER yang digunakan sebagai perhitungan kinerja perusahaan:

Tabel 2. 2
Peringkat PROPER

Peringkat	Keterangan	Skor
Emas	Diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan, melaksanakan bisnis yang beretika serta melakukan upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.	5
Hijau	Diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan lebih dari yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), serta melakukan upaya tanggung jawab sosial yang baik.	4
	Diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan	

Biru	upaya pengelolaan lingkungan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3
Merah	Diberikan kepada perusahaan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau baru Sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2
Hitam	Diberikan kepada perusahaan yang belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah dipersyaratkan sehingga berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.	1

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.1.5. *Good Corporate Governance (GCG)*

Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), korporasi adalah badan hukum berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dengan struktur governance yang mencakup kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan. Istilah *governance* digunakan karena lebih mencerminkan hubungan eksternal korporasi dengan pemangku kepentingan, bukan sekadar pengelolaan internal (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021), *Governance* mencakup hubungan, hak, dan tanggung jawab antara perusahaan dan pemangku kepentingan

yang lebih luas, ter masuk pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, dan masyarakat. *Corporate governance* bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam menjalankan bisnis perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021).

Good Corporate Governance (GCG) menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris agar perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. GCG melindungi hak pemangku kepentingan dan memastikan keputusan perusahaan selaras dengan kepentingan bersama. Dalam konteks pengungkapan emisi karbon, komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan proksi GCG yang paling berpengaruh.

2.1.5.1. Komisaris Independen

Menurut PUGKI 2021 oleh KNKG, komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan finansial atau struktural dengan perusahaan, sehingga tetap objektif dalam pengambilan keputusan. Mereka diharapkan berkontribusi secara jujur, aktif, dan konstruktif dalam rapat dewan komisaris (Komite Nasional Kebijakan *Governansi*, 2021). Komisaris independen berperan penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan dan regulasi. Dengan

sifatnya yang objektif, mereka mengawasi manajemen, mendorong transparansi, serta menjamin akuntabilitas dan kepentingan pemangku kepentingan tetap terjaga (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021)

2.1.5.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga seperti dana pensiun atau bank, yang berperan penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Keterlibatan aktif mereka mendorong akuntabilitas manajemen, menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan berorientasi jangka panjang (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021)

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan Dengan Peneliti
1	Gunawan, Maulina Septa Ning (2024)	Pengaruh <i>Green Investment</i> Dan <i>Good Corporate</i>	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa <i>Green Investment</i> belum memberikan	Memiliki kebaruan dari sisi konteks geografis, sektor spesifik, dan

		<i>Governance</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor <i>Basic</i> <i>Materials</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019- 2022	kontribusi terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate</i> <i>governance/GCG</i>) berperan dalam mendukung pengungkapan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat terus memperkuat transparansi informasi, khususnya dalam hal pengungkapan emisi karbon (Gunawan, 2024)	waktu.
2	Kamila Ramadhani,	Pengaruh <i>Green Strategy</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Kombinasi <i>Green</i>

	Christina Dwi Astuti (2023)	Dan <i>Green Investment</i> Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> Dengan <i>Media Exposure</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	<i>Green Investment</i> tidak memberikan dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara itu eksposur media mampu meningkatkan pengaruh <i>Green Investment</i> terhadap pengungkapan emisi karbon (Ramadhani & Astuti, 2023)	<i>Investment</i> dan GCG dalam penelitian yang dilakukan peneliti dapat dianggap sebagai kebaruan karena memperkuat kajian terhadap faktor keberlanjutan yang relevan dengan praktik tata kelola perusahaan di indonesia.
3	Karina Puspa Sari, Barkah Susanto, Nur Laila Yuliani	<i>Green Strategy, Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen	Peneliti menunjukkan kontribusi baru, terutama dalam penggabungan

		<i>Disclosure, Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	(GCG) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (Sari & Susanto, 2021)	<i>Green Investment</i> dan GCG sebagai faktor penting dalam pengungkapan emisi karbon di sektor energi indonesia.
4	Amrie Firmansyah, Pramuji Handra Jadi, Wahyudi Febrian, Deddy Sismanyudi (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan emisi karbon. Pengelolaan tata kelola yang efektif mendorong peningkatan transparansi dalam penyampaian	

			informasi kepada publik, termasuk penyampaian data secara sukarela terkait emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan (Firmansyah et al., 2021).	
5	Jhon Urasti Blesia, Enggelina Trapen, Rama Soyan Arunglamba	<i>The Moderate Effect Of Good Corporate Governance On Carbon Emission Disclosure And Company Value</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pengungkapan emisi karbon setelah perubahan pada standar akuntansi keuangan indonesia nomor 1 pada tahun 2014 yang mengatur pengungkapan terkait lingkungan, tata	Penggabungan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dan penerapan fokus sektor energi di indonesia, yang memberikan konteks yang lebih relevan

			kelola perusahaan yang baik tidak mampu memoderasi hubungan antara mampu memoderasi pengungkapan emisi karbon (Blesia et al., 2023)	dengan tantangan keberlanjutan saat ini.
6	Jenita Felicia Candra, Lindrianasari (2024)	<i>Corporate Governance In Basic Material And Energy Sector Companies, Green Strategy, And Carbon Emissions Disclosure</i>	Hasil uji-t yang dilakukan untuk penelitian ini menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,132 dengan tingkat signifikan 0,0354, yaitu kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas emisi karbon secara signifikan dipengaruhi oleh tata kelola	Penelitian yang akan dilakukan membawa kebaruan dengan menyelidiki dampak langsung dari <i>Green Investment</i> dalam sektor energi indonesia, serta menghubungkan dengan aspek tata kelola

			perusahaan yang baik (Candra, 2024).	perusahaan dan pengungkapan emisi karbon di masa yang penuh perubahan kebijakan lingkungan.
7	Indah Mutiara Dani, Puji Harto (2022)	Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan <i>Green Investment</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Green Investment</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (Indah Mutiara Dani, 2022)	Penelitian ini akan dilakukan dengan perusahaan yang tercatat pada papan perdagangan utama di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023.
7	Winda Ramadhanti (2024)	Pengaruh <i>Green investment,</i> <i>Board Gender</i>	Hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa <i>Green Investment</i>	Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan

		<i>Diversity, Environmental Committee, Dan Foreign Ownership Terhadap Carbon emission disclosure</i>	berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (Ramadhanti, 2024).	literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi <i>Carbon Emission Disclosure</i> di sektor energi dengan fokus pada praktik keberlanjutan dan tata kelola perusahaan
8	Nurul Fitri Muamalah (2024)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, <i>Media Exposure, Dan Good Corporate Governance Terhadap</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Muamalah, 2024).	Penelitian ini diteliti menggunakan analisis regresi data panel dengan metode estimasi seperti <i>Fixed Effect Model, Random</i>

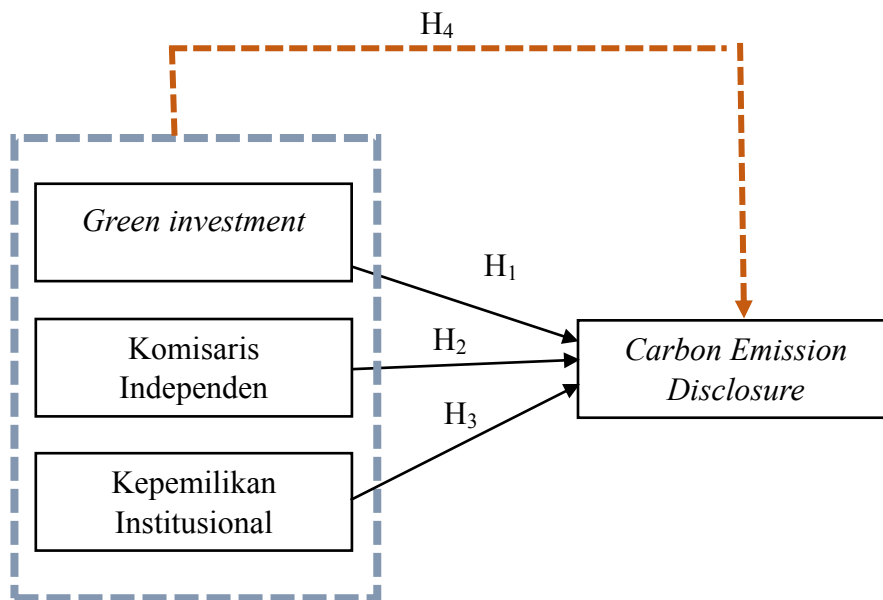
		<i>Carbon emission disclosure</i>		<i>Effect Model, dan Uji Chow atau Husman</i>
9	<i>Maria Eka Septia Yesiani, Dian Purnama Sari, Natalia Kristina (2024)</i>	Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan <i>Green Investment</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Penelitian ini menunjukkan <i>Green Investment</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Yesiani et al., 2024)	Populasi perusahaan terdiri dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *Green Investment* dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————→ Berpengaruh secara persial terhadap *carbon emission disclosure*

----- Secara simultan berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran spesifik tentang cara mengukur atau mengamati suatu variabel dalam penelitian, sehingga memudahkan proses pengumpulan dan analisis data (Hantono, 2020). Definisi operasional variabel dalam penelitain ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	<i>Green investment</i>	Data interval yang diperoleh dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	PROPER Emas : 5 PROPER Hijau : 4 PROPER Biru : 3 PROPER Merah : 2 PROPER Hitam : 1 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021)
2	Komisaris Independen	Proporsi komisaris independen dalam total anggota dewan komisaris perusahaan.	$= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}} \times 100\%$ (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2014),
3	Kepemilikan Institusional	Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham	$= \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ (Suteja, 2020:16), (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021)

		institusional dalam total saham yang beredar	
4	<i>Carbon Emission Disclosure</i>	pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terkait emisi karbon mereka dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan	$CED = \frac{\text{Total skor perusahaan}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$ (Choi et al., 2013; Climate Change Authority, 2023)

2.5. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Green Investment* Terhadap *Carbon emission disclosure*.

Green Investment adalah investasi pada kegiatan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak ekologis dan mendukung keberlanjutan. Berdasarkan teori *stakeholder*, investasi ini mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan meningkatkan legitimasi sosial. *Green Investment* diduga berpengaruh terhadap carbon emission disclosure karena mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Syabilla et al., 2021) , menunjukkan bahwa *Green*

Investment berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*).

H₁: *Green Investment* berpengaruh secara signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

2.4.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Komisaris independen adalah anggota dewan dari luar perusahaan yang memenuhi ketentuan OJK dan berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan, termasuk dalam pengungkapan emisi karbon. Proporsi komisaris independen yang lebih tinggi dapat meningkatkan carbon emission disclosure dengan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan harapan pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2022) menemukan bahwa komisaris indenpenden berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

H₂: Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga yang berperan mengawasi dan mengarahkan manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemangku kepentingan. Berdasarkan teori stakeholder, semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Angelina & Handoko, 2023), kepemilikan institusional menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

2.4.4. *Green investment*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Berpengaruh Secara Simultan Terhadap *Carbon emission disclosure*.

Hipotesis ini didasarkan pada teori stakeholder dan legitimasi, yang menyatakan bahwa *Green Investment* mencerminkan tanggung jawab lingkungan, komisaris independen menjamin tata kelola yang baik, dan kepemilikan institusional mendorong transparansi. Meskipun belum ada penelitian yang menguji ketiganya secara simultan, teori ini memberikan dasar argumen yang kuat dan potensi

kontribusi akademik. Penelitian sebelumnya yang mengkaji variabel tersebut secara terpisah menjadi landasan dalam perumusan hipotesis ini

H₄: *Green investment*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.